

## PENGARUH KEPEMIMPINAN KEUCHIK TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT GAMPONG DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

Subarni<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Musrizal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alumni Prodi Manajemen FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) – Aceh

<sup>2</sup>Dosen FEB Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) – Aceh

<sup>3</sup>Dosen FE Universitas Almuslim (UMUSLIM) Bireuen – Aceh

email: subarni.peusangan@gmail.com ; my.as72@gmail.com

Received: September 25, 2022; Accepted: September 28, 2022; Published: September 28, 2022; Page: 31 – 37

DOI: 10.51179/eko.v14i2.2581

### Abstract:

The research aims to analyze the influence of Keuchik leadership on the economic empowerment of gampong communities. This is a case study in Peusangan District, Bireuen Regency in 2022. With a quantitative approach using questionnaire instruments and analysis using regression and correlation. The research results stated; (1) the success rate of keuchik leadership is not optimal at 79.81%. And the village government's efforts to empower the community's economy have only reached 75.37%, which is in line with expectations. (2) From the regression analysis, it is proven that there is a significant influence of keuchiek leadership in empowering the community's economy. From the correlation analysis, it was obtained that the keuchik leadership variable contributed 63% to the economic empowerment of the community in Peusangan sub-district, Bireuen Regency.

Key words: keuchik leadership, community economic empowerment

### Abstrak:

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan *Keuchik* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*. Merupakan studi kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tahun 2022. Dengan pendekatan kuantitatif melalui instrument kuesioner dan analisis menggunakan regresi dan korelasi. Hasil penelitian menyatakan; (1) tingkat keberhasilan kepemimpinan *keuchik* belum optimal sebesar 79,81%. Dan upaya pemerintahan desa melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat baru mencapai 75,37% yang sesuai harapan. (2) Dari analisis regresi, membuktikan terdapat pengaruh yang signifikans kepemimpinan *geuchiek* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari analisis korelasi, diperoleh sebesar 63 % kontribusi variabel kepemimpinan *keuchik* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

Kata kunci: kepemimpinan *keuchik*, pemberdayaan ekonomi masyarakat

## 1. Pendahuluan

Pemerintahan desa (*gampong*) sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia, yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. *Gampong* (desa) merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat *gampong* akan membawa dampak bagi kegagalan

program pemerintahan di atasnya juga.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak *gampong* (khususnya masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin, sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada dibatas atau dibawah ambang kemampuan materiil, untuk mencukupi kebutuhan

hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Kemiskinan sosial, tampak nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari lingkungannya.

Secara kultural, masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi atau struktur sosial. Dan secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang di berlakukan diwilayahnya. Bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Jika tahun 1990, ada sebanyak 27,2 juta penduduk Indonesia adalah tergolong miskin, dan tahun 2010 lalu juga masih tinggi, hampir mencapai 25 juta jiwa, dan sekitar 14 ribu terdapat di Aceh. Data BPS Aceh mengungkap, tahun 2020 nasuh terdapat diatas 15% penduduk dikategorikan miskin, tahun 2022 lalu ada penurunan tinggal 14,64% dari seluruh penduduk Aceh yang berjumlah 5,4 juta Jiwa. Di daerah pedesaan, persentase penduduk miskin lebih tinggi yakni 17,06 persen sedang di perkotaan 10,35%.

Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan penduduk yang jumlahnya masih relatif besar tersebut adalah relevan. Inisiatif ini dituangkan dalam instruksi Presiden tentang peningkatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan nama INPRES Desa Tertinggal (IDT). Kemudian dilanjutkan dengan program Baksos. Di Provinsi Aceh, dikenal dengan Bantuan Pembangunan Desa.

Secara jujur masih banyak masalah yang perlu di benahi. *Pertama*, kemiskinan pedesaan (*rural poverty*), merupakan salah satu topik yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan pertanian dan pedesaan, yang umumnya dalam belunggu kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya. *Kedua*, kesempatan kerja. Pertambahan angkatan kerja yang cepat pun membawa dampak bagi pengangguran. Dalam kaitan ini, daerah pedesaan dengan sifat ekonominya belum terlalu komersial financial dapat diharapkan mampu mengurangi beban ledakan tersebut, dengan menampung sebagian pencari kerja.

Daya serap perekonomian desa memang terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan kerja dipedesaan, ditambah meningkatnya mobilitas penduduk, mendorong terjadinya proses urbanisasi ke kota. Implikasinya, salah satu yang jelas, apabila sektor pedesaan dan pertanian diharapkan

mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja adalah adanya keharusan pemerintah untuk menambah basis ekonomi desa.

Masalah *ketiga*, sifat hubungan impersonal. Implikasi dari makna formal komersial hubungan ekonomi di pedesaan, dan yang sekaligus merupakan tantangan pembangunan adalah bagaimana mempersiapkan para petani dalam menghadapi transaksi yang impersonal. Kemungkinan pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumahaan, keuangan, dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk alternatif usaha yang perlu dipikirkan.

Basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua hal. *Pertama*, sumberdaya alam yang tersedia, dan yang kedua sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam memberikan basis ekonomi yang nantinya dapat diolah dan dikembangkan. Sumberdaya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tadi. Kedua sumberdaya ini tentunya kondisinya tidak sama antar daerah dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara terus-menerus. Karena itulah kiranya perlunya dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber daya alamnya maupun manusianya. Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan, terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas.

Secara mikro dapat diambil kasus di Aceh, salah satunya di kabupaten Bireuen. Tersendatnya pembangunan desa, termasuk 36 *gampong* di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, antara lain disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah (1) Masih terdapat *gampong* (desa) yang dalam segi pembangunan ekonomi kerakyatannya masih tertinggal dari kota kabupatennya, (2) Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, yaitu ada *gampong* yang berpenduduk terlalu padat dengan jumlah tenaga kerja yang melebihi daya tampung lain dan ada pula yang berpenduduk terlalu sedikit dibanding dengan potensi yang tersedia, sehingga kekurangan tenaga kerja dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa (*gampong*), (3) Pemerintahan *gampong* dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan (4) Tingkat kesadaran dan keterampilan - pendidikan penduduk masih belum memadai, menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang rendah.

Didalam struktur organisasi pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan asas ekonomi. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa atau *Keuchik* yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat *gampong*, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Kepemimpinan seorang kepala desa (*Keuchik*), selain sebagai administrator, maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan. Pembangunan pedesaan mencakup proses modernisasi untuk mengubah sikap dan pola pikir yang justru malah mendorong pembangunan, diantaranya pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan seorang Kepala Desa sangatlah penting di dalam Era Otonomi seperti sekarang ini. Tugas-tugas seorang Pemimpin tersebut sangatlah berpengaruh terhadap aparatur desa dan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dengan segenap aparatur harus memelopori, mengarahkan pikiran, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya (Kawung S. H, et al; 2019).

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat *gampong* dan pembangunan *gampong*. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin kota dan orang miskin desa.

Berkaitan dengan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan analisis kepemimpinan *Keuchik* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*. Dengan melakukan penelitian “Pengaruh Kepemimpinan *Geuchiek* terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat *gampong* di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen”.

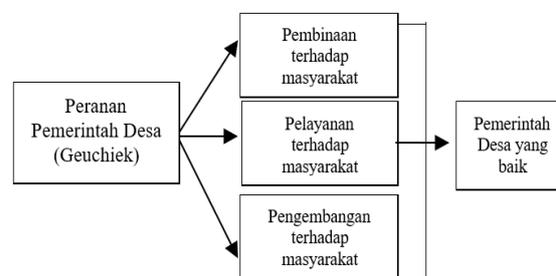
## 2. Tinjauan Teori

### a. Desa (*gampong*) dan Peran Kepala Desa (*Keuchik*)

Desa (*gampong*) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Soenardjo, dalam Nurcholis, 2011).

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa yaitu Kepala Desa (*Keuchik*) dan Perangkat Desa. Perangkat membantu *Keuchik* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No.72/2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian, lebih jauh, Kepala Desa (*Keuchik*) mempunyai wewenang antara lain: (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, (b) Mengerjakan rancangan peraturan desa, (c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, (d) Menyusun dan mengerjakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, (e) Membina kehidupan masyarakat desa dan membina perekonomian desa.

Menurut Winarni (2003) pemerintah desa harus berperan sebagaimana digambarkan berikut:



Gambar 1. Skema Peran Pemdes (Keuchik)

Oleh karenanya pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa (*Keuchik*). Khususnya lagi dalam pemberdayaan

masyarakat. Kedudukan yang strategis dimiliki *Keuchik* sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### **b). Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pembangunan desa mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh masyarakat desa yang berarti adalah mengembangkan kemandirian. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat dari hasil-hasil pembangunan tersebut (Paton, 2005). Pembangunan perdesaan pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat (Adisasmita, 2013).

Tujuan utama dilakukannya pembangunan perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang didalamnya mengandung tiga nilai penting yaitu: (1) Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri; dan (3) Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak lain (Goulet dalam Sangian dkk, 2018).

Desa sesungguhnya merupakan basis dari kegiatan pembangunan nasional. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan Desa. Pemberdayaan masyarakat di Desa mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam pembangunan Desa seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat Desa. Karena masyarakat desanya, maka hendaknya mereka ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan (Margayaningsih, 2017).

Pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra (2006) adalah “suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengeva-

luasi perubahan yang terjadi. Konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (2003), mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal utama yaitu: 1) Pengembangan (*enabling*), 2) Memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan 3) Menciptakan kemandirian.

Dan menurut Widjaja (2003) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social, agama dan budaya.

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Penelitian Margayaningsih (2017) bahwa faktor pendukung pemberdayaan dalam kegiatan masyarakat adalah motivasi dan kebijaksanaan pemerintah sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah anggaran dan sarana prasarana.

### **3. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu melukiskan keadaan yang sebenarnya guna memperoleh fakta yang akan diolah menjadi data, kemudian diolah lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *descriptive* dan *verificative*.

Penelitian *descriptive* merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di desa pada Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen . Sedangkan penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan (Arikunto, 2006). Penelitian dilakukan di pemerintahan desa kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, meliputi 36 desa dengan objek penelitian adalah masyarakat desa yang menilai Kepala Desanya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan sampling purposif yaitu sebagian masyarakat Desa mewakili setiap desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan menetapkan setiap desa 2 kepala keluarga, sehingga jumlah objek sampel masyarakat adalah 72 orang mewakili 36 desa.

Untuk menjawab permasalahan mengenai ada tidaknya pengaruh kontribusi Kepemimpinan

Kepala Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di *gampong*, digunakan pendekatan analisis korelasi dan analisis regresi liner. Operasional variabel penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Operasional Variabel**

Variabel	Indikator
<b>Kepemimpinan Keuchik (X)</b>	1. Kemampuan menggerakkan masyarakat 2. Mengarahkan 3. Memotivasi 4. Membimbing, dan membina. 5. Inovatif
<b>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Y)</b>	a. Faktor- faktor pendukung: 1) Partisipasi Masyarakat 2) Potensi Sumberdaya Alam b. Faktor- faktor Penghambat: 1) Kurangnya bantuan dari Pemerintah Daerah 2) Masyarakat Desa belum bisa menerima hal- hal baru

## 4. Hasil Dan Pembahasan

### a. Hasil Penelitian

#### 1). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Penelitian dilakukan secara survey terhadap masyarakat, sehingga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Berikut hasil uji validitas kedua variabel.

Tabel 2. Uji Validitas Kepemimpinan *Keuchik*

No	Pertanyaan	r-hit	r-tabel
1.	Kemampuan mempengaruhi untuk menggerakkan masyarakat dalam berkarya	0,476	0,232
2.	Kemampuan mempengaruhi untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam program desa	0,762	0,232
3.	Mengarahkan dan memotivasi masyarakat	0,517	0,232
4.	Membimbing, dan menasehati masyarakat dengan arif dan bijaksana.	0,556	0,232
5.	Mampu menumbuhkan ide-ide baru yang inovatif di masyarakat desa	0,726	0,232
6	Kemampuan menjalankan program ekonomi desa	0,512	0,232

Dari tabel 2, tampak bahwa kesemua butir yang dikembangkan dalam mengukur kepemimpinan *Keuchik* dinyatakan valid pada taraf uji 5%, karena hasil r-hitung > r-tabel.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

No	Pertanyaan	r-hit	r-tabel
1	Partisipasi Masyarakat dalam mengembangkan ekonomi rakyat dan membangun desa, sangat baik	0,521	0,232
2.	Potensi sumber daya alam di desa	0,711	0,232

	cukup mendukung		
3.	Potensi sumber daya manusia cukup dalam penggerak ekonomi	0,471	0,232
4	Adanya bantuan dari Pemerintahan Daerah dan pusat yang cukup	0,626	0,232
5.	Kemampuan desa untuk dapat mengembangkan ekonomi rakyat	0,746	0,232
6.	Umumnya tersedia Sarana pendukung membangun ekonomi masyarakat	0,548	0,232

Demikian pula dari tabel 3, menyatakan kesemua butir pengukur Variabel Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diperoleh valid pada.

Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's alpha* ( $\alpha$ ) diperoleh hasil berikut:

Tabel 4. Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i> ( $\alpha$ )	Reliabilitas
Kepemimpinan <i>Keuchik</i>	0,782	Cukup
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	0,816	Tinggi

#### 2). Analisis Deskriptif

##### Tingkat Kepemimpinan *Keuchik*

Dari hasil data yang diperoleh melalui penilaian 72 responden terhadap kepemimpinan *Keuchik*, diperoleh skor penelitian adalah 1724, sedangkan skor ideal (skor maksimum), dengan jumlah 6 item, ditentukan dari:  $5 \times \text{Jumlah item} \times \text{banyak responden} = 5 \times 6 \times 72 = 2160$ . Maka hasil pencapaian atau tingkat keberhasilan kepemimpinan *Keuchik* atau Kepala Desa di kecamatan Peusangan Bireuen sebesar adalah 79,81%. Dari hasil ini dinyatakan belum optimal, walaupun umumnya kepemimpinan *Keuchik* dianggap cukup baik.

##### Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

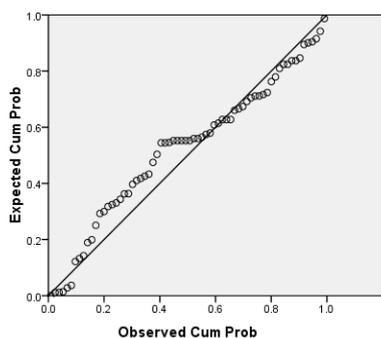
Dari hasil penelitian berkaitan dengan upaya pemerintahan desa melakukan pemberdayaan masyarakat, baik dalam ukuran factor pendukung atau penghambat, diperoleh skor penelitian adalah 1628. Sedang skor ideal 2160. Maka masyarakat menilai baru mencapai 75,37% yang sesuai harapan.

#### 3). Hasil Analisis Regresi

##### Uji Asumsi dalam Model

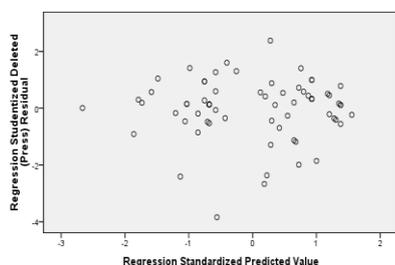
Untuk dapat meyakinkan dalam pendekatan analisis regresi sebagai bagian dari analisis inferensia, pertama perlu dilakukan uji asumsi

klasik (baik uji normalitas, Heterokedastisitas, multikolinearitas). Uji normalitas data dalam model regresi, menggunakan metode plot (kurva normal), yakni meninjau kurva dalam dalam model regresi, dimana hasilnya plot membentuk garis lurus maka dapat diasumsikan normal (gambar 2).



Gambar 2. Uji Normalitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengandung varian residu yang bersifat heterokedastisitas. Uji ini dapat dilihat pada grafik *scatterplot* (gambar 3). Berdasarkan gambar *scatterplot* diatas, tidak terdapat pola yang dibentuk dari residu, sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat efek heterosidastitas antar variabel.



Gambar 3. Uji Heterosidastitas

Untuk uji multikolinearitas secara statistik dapat diterapkan dengan memeriksa nilai toleransi multikolinearitasnya terhadap VIF. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat: Nilai *Tolerance* dan *Variance Factor* (VIF). Hasil olahan data diperlihatkan berikut ini:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model Regresi	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
Contant	3.425	1.206		
Kepemimpinan <i>Keuchik</i>	0.325	0.068	0.201	3.573

Dependent variable: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dari informasi diatas, maka karena *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF > 1, maka dapat dinyatakan variabel tidak terdapat multikolineritas.

### Uji Model Regresi

Seperti disebutkan dalam rancangan analisis, maka analisis masalah yang diteliti menggunakan analisis regresi, dengan persamaan:  $Y = a + b X + \epsilon$  ( $Y$  = Pemberdayaan ekonomi masyarakat,  $X$  = Kepemimpinan *Keuchik*). Hasil pengolahan data dengan program SPSS. Maka hasilnya tentang taksiran model regresi dan uji signifikans koefisien regresi, diperoleh:

Tabel 6. Uji Signifikans koefisien Regresi

Model Regresi	Unstandardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error		
Contant	3.425	1.206	2.839	0.133
Kepemimpinan <i>Keuchik</i>	0.325	0.068	4,779	0.000

Dependent variable: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tabel 6 diatas, menjelaskan bahwa model regresi antar variabel:  $Y = 3,425 + 0,325 X$ . ( $Y$  = Pemberdayaan ekonomi masyarakat,  $X$  = Kepemimpinan *Keuchik*).

### b. Pembahasan

Dari hasil penelitian, khususnya tentang hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti, maka besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti dari model regresi  $Y = 3,425 + 0,325 X$  menyatakan jika kepemimpinan *Keuchik* dapat ditingkatkan setara dengan 10%, akan dapat meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 3,25%. Hasil yang diperoleh didukung dengan hasil koefisien korelasi dan determinasi berikut:

Tabel 7. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square
Regresi	0.794 <sup>a</sup>	0.630

Maka koefisien korelasi antara kepemimpinan *Keuchik* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat erat, sebesar  $R = 0,794$ . Sehingga koefisien determinasinya  $R^2 = 0,630$ , artinya sebesar 63 % kontribusi variabel kepemimpinan *Keuchik* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong kecamatan Peusangan di Kabupaten Bireuen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, di dukung penelitian Kawung S. H, et al (2019) di Minahasa, dengan hasinya menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dan kepala desa di Desa Koreng

Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan lebih ke tipe gaya kepemimpinan *laissez faire*. Juga penelitian Nandang, et al. (2022), dengan hasil bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa dalam mengembangkan UMKM desa, baik membuat keputusan, kemampuan memotivasi, kemampuan komunikasi, mengendalikan bawahan dan mengemban tugas bertanggungjawab serta emosi sangat baik dan penting dalam pemberdayaan masyarakat.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan penelitian, sebagai berikut:

- Tingkat keberhasilan kepemimpinan *Keuchik* belum optimal walaupun cukup baik sebesar 79,81%.
- Upaya pemerintahan *gampong* melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat baru mencapai 75,37% yang sesuai harapan. Hal ini perlu ditingkatkan khususnya partisipasi masyarakat meningkatkan taraf ekonominya
- Dari hasil analisis regresi, membuktikan terdapat pengaruh yang signifikans kepemimpinan *Keuchik* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*.
- Dari analisis korelasi, diperoleh sebesar 63 % kontribusi variabel kepemimpinan *Keuchik* terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong* di kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

## Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahargo (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan. Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwi Iriani Margayaningsih (2017). Upaya Pemerintah Kabupaten Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Pada Program Adipura , *Publiciana*: Vol. 10 No. 1

Kawung S. H, Posumah J. H., Ruru J. Marhaen (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Studi Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan), *E-Journal UNSRAT*

Nandang, Wanta, Rengga Madya Pranata (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengembangkan UMKM Desa Karya Mulya, *KREATIFE, Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif*, 8(1): 61-69

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.

Patton, Adri. (2005). Peran Pemimpin Informal Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau Kalimantan Timur. Malang: *PPS Unibraw*.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sangian, D., Dengo, S., & Pombengi, J. (2018). Pendekatan partisipatif dalam pembangunan di desa tawaang kecamatan tenga kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).

Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Sulistiyani, Ambar Teguh (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media

Widjaja, AW. (2003). *Peranan Motivasi dalam Kepemimpinan*, cetakan pertama, Jakarta: Akademika Pressindo

Winarni, Tri, 2003, *Memahami pemberdayaan masyarakat Desa partisipasif dalam orientasi pembangunan masyarakat desa menuju pemberdayaan pelayanan masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.